KATA TIDAK SEKEDAR MELAWAN

Gerakan Puisi
Menolak Korupsi

Sosiawan Leak,
Gol A Gong
Nanang Farid Syam,
dkk.

Scanned with CamScanner

Sosiawan Leak, dkk.

KATA TIDAK SEKEDAR MELAWAN

Gerakan Puisi Menolak Korupsi

Beranda
Malang 2017

Scanned with CamScanner

Kata Tidak Sekedar Melawan
Gerakan Puisi Menolak Korupsi

Copyright © Agustus, 2017

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Beranda. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ukuran: 14cm X 21cm; Hal: xxii + 190

ISBN: 978-602-74184-9-3

Penulis:
Sosiawan Leak
Ahmadun Yosi Herfanda
Badaruddin Amir
Dewa Putu Sahadewa
Fakhrunnas MA Jabbar
Fikar W.Eda
Gol A Gong
Heru Mugiarso
Hilda Rumambi
Nanang Farid Syam
RD Kedum
Ribut Basuki
Rusda Leikawa
Salman Yoga S
Sudaryono
Dr. Sulaiman Juned, S.Sn., M.Sn
Sulis Bambang
Sunaryo Broto
Vonny Aronggear

Cover: Dino Sanggrha Irnanda
Lay Out: Kamilia Sukmawati

Penerbit:
Beranda
Kelompok Intrans Publishing
Wisma Kalimetro
Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim
Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010
Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com
Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com
Website: www.intranspublishing.com
Anggota IKAPI

Scanned with CamScanner

Tatkala hati nurani tertutup oleh buih keserakahan dan dahaga kekuasaan maka yang dipikirkan hanyalah bagaimana merebut kekuasaan baik politik maupun ekonomi, dengan menghalalkan segala cara. Standar moralitas publik tak lagi diindahkan. Kira-kira situasi inilah yang terjadi di republik ini. Tindakan koruptif telah menjelma menjadi bagian dari proses politik untuk menyangga kekuasaan. Buku ini tak sebatas kumpulan kata dan kalimat melainkan untaian idealisme yang penuh spiritualitas untuk melawan praktik-praktik budaya koruptif yang semakin bar-bar di tanah kita, Indonesia.

Luthfi J. Kurniawan *Pendiri Malang Corruption Watch*

Korupsi itu racun ganas kebudayaan dan peradaban karena menyebarkan banalitas di urat nadi kehidupan kebudayaan dan peradaban, menggusur puitika atau estetika yang memberi laburan keindahan di dalam kebudayaan dan peradaban. Gerakan Puisi Melawan Korupsi yang diageni atau diaktori oleh Sosiawan Leak dkk pada dasarnya gerakan perlawanan simbolis puitik atau estetik terhadap banalitas kehidupan yang dilesakkan laku korupsi di urat nadi kebudayaan dan peradaban. Puisi yang ditulis para penyair dan dibukukan dalam Puisi Menolak Korupsi, kemudian dibacakan di pelbagai ruang publik menjadi testimoni betapa merusaknya korupsi bagi kebudayaan dan peradaban sekaligus siasat resistensi. Maka, menyimak dan membaca Puisi Menolak Korupsi kita serasa sedang berpartisipasi menjadi saksi sekaligus barisan agen perlawanan simbolis terhadap korupsi.

Prof. Dr. Joko Saryono *Universitas Negeri Malang*

Puisi tak sekedar teks & kumpulan pilihan kata. Bila padanya diberi konteks, puisi dapat bertransformasi menjadi "senjata" tak lagi sekedar kata. Jika saja teks & konteks diberi imaji & spiritualitas, puisi dapat diubah menjadi spirit perlawanan, membiakkan gerakan & melahirkan kebangkitan. Sosiawan Leak tengah menghidupkan perlawanan, gerakan dan kebangkitan atas korupsi melalui bukunya Puisi Menolak Korupsi.

Bambang Widjojanto *Mantan Pimpinan KPK*

BERANDA
KELOMPOK INTRANS PUBLISHING
Jl. Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang
Telp. (+62)341-573650
Fax. (+62)341-588010
Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pernaskahan)
intrans_malang@yahoo.com (Pemasaran)
www.intranspublishing.com

ISBN: 978-602-74184-9-3
9 786027 418493

Scanned with CamScanner

Daftar Isi

Kata Pengantar: Seni: Pasti Melawan Korupsi
Nanang Farid Syam -- *v*

Kata Pengantar: Tentang Gerakan PMK (Puisi Menolak Korupsi)
Sosiawan Leak (Koordinator Gerakan Puisi Menolak Korupsi) -- *xii*

Pengantar Penerbit -- *xvi*

1: PUISI PMK SEBAGAI PENDORONG PERUBAHAN SOSIAL
Ahmadun Yosi Herfanda -- 1

2: CAU BORNEO: TEKS PUISI ANTIKORUPSI
Ali Syamsudin Arsi -- 7

3: MELAWAN KORUPSI BAGAI MEMADAMKAN API DALAM SEKAM (Kolaborasi Lintas Profesi Melalui Puisi dan Karya Sastra Lainnya)
Badaruddin Amir -- 15

4: MENANAMKAN NILAI ANTIKORUPSI LEWAT KATA
Dewa Putu Sahadewa -- 24

Scanned with CamScanner

MENOLAK KORUPSI

Fakhrunnas MA Jabbar -- 28

6: "MUNIMANG GERE ANGIK"

Fikar W. Eda -- 33

7: LITERASI ANTIKORUPSI DI RUMAH DUNIA

Gol A Gong -- 37

8: KORUPSI VS PMK

Heru Mugiarso -- 43

9: QUO VADIS GERAKAN PUISI MENOLAK KORUPSI?

Hilda Rumambi -- 48

10: TERSESAT DI JALAN LURUS

Nanang Farid Syam -- 56

11: MENYAYAT KORUPSI DENGAN SASTRA (Membangun Kesepahaman dan Kesadaran Masyarakat dengan Karya Sastra dan Seni)

RD Kedum -- 69

12: MEMBANGUN GERAKAN MENOLAK KORUPSI SEBAGAI BUDAYA TANDINGAN

Ribut Basuki -- 74

13: LAWAN KORUPTOR LEWAT PINTU UTAMA

Rusda Leikawa -- 81

14: SASTRA TRADISI (DIDONG GAYO) INDONESIA ANTIKORUPSI

Salman Yoga S -- 92

15: KOMUNITAS DAN LITERASI ANTIKORUPSI MEMBANGUN GENERASI ANTIKORUPSI SEJAK DINI

Shantined -- 99

16: IMUNISASI KORUPSI

Scanned with CamScanner

12

MEMBANGUN GERAKAN MENOLAK KORUPSI SEBAGAI BUDAYA TANDINGAN

Ribut Basuki[9]

Sebagian orang tidak setuju ketika dikatakan bahwa korupsi adalah bagian dari budaya kita. Ini karena pemahaman mereka tentang budaya, disadari atau tidak, mengacu kepada pengertian yang berkembang sejak abad 19 di Eropa bahwa budaya adalah intisari dari kehidupan masyarakat dalam bentuk "nilai-nilai luhur" yang harus dilestarikan. Yang sering tidak disadari adalah "nilai-nilai luhur" itu berhenti sebagai nilai yang sering tidak lagi berkembang bersama masyarakatnya. Disamping itu, 'nilai-nilai luhur' juga sering hanya berlaku bagi kelompok tertentu, terutama kelompok dominan, sehingga masyarakat akar rumput menjadi terpinggirkan. Ada yang mengatakan sejarah ditulis untuk para pemenang (penguasa), sehingga nilai yang didapat dari proses sejarah tersebut berjarak dengan masyarakat kebanyakan.

Dalam pemahaman yang berkembang belakangan, misalnya melalui Raymond Williams, budaya tidak lagi hanya dilihat

[9] UK Petra, Surabaya.

sebagai intisari dari kehidupan, tetapi totalitas kehidupan itu sendiri, *"the whole way of life"*. Dengan pemahaman ini, budaya adalah semua yang berhubungan dengan kehidupan suatu masyarakat, baik atau buruk, konstruktif ataupun destruktif. Di samping itu, budaya juga dapat dilihat sebagai *"the ensemble of social processes by which meanings are produced, circulated, and exchanged"* (Thwaites et. al., 1994). Dengan demikian, budaya tidak terlepas dari produksi, sirkulasi, dan pertukaran makna. Belsey mengatakan, budaya adalah *"the inscription in stories, rituals, customs, objects, and practices of meanings in circulation at a specific time and place"* (dalam Miles, 2007). Ini berarti bahwa budaya menyangkut segala yang berhubungan dengan makna yang ada dalam **produk** (cerita, ritual, adat-istiadat, dll., bahkan termasuk makanan) dan **praktik** (cara melakukan ritual, mencari nafkah, mengatur lingkungan, dll., bahkan termasuk cara mengisi waktu senggang) suatu masyarakat dalam masa tertentu. Ada dimensi ruang dan waktu dalam budaya, sehingga budaya adalah suatu yang hidup dalam konteks tertentu dan akan terus berubah sesuai dengan perubahan konteksnya. Dengan pemahaman ini, suka tidak suka, korupsi sebagai bentuk praktik yang sudah berurat akar dalam masyarakat kita adalah bagian dari budaya kita. Di konteks zaman kerajaan, ketika raja adalah pengendali segala kuasa, korupsi menggunakan kekayaan atau fasilitas negara bagi kepentingan sendiri tidak dikenal. Di zaman Orde Baru, pejabat bisa mendapatkan fasilitas dari negara untuk kepentingan pribadi dan bahkan keluarganya, namun itu dianggap sesuatu yang wajar saja. Seiring dengan perubahan konteks budaya, baru kita pahami bahwa ternyata semua itu merupakan praktik korupsi.

Dalam pemahaman baru ini, budaya tidak digambarkan sebagai situasi yang aman, sentosa, sejahtera, tanpa konflik. Karena suatu masyarakat selalu majemuk, bahkan dalam masyarakat yang mono etnis atau agama sekali pun, maka tarik menarik kepentingan selalu terjadi. Dalam konteks demikian,

maka selalu ada kontestasi kuasa dari mereka yang memiliki kepentingan, baik itu kepentingan luhur maupun hanya kepentingan diri. Masing-masing pihak atau kelompok kepentingan memiliki pola pikir atau keyakinan, yang secara teknis disebut ideologi, yang berbeda. Maka dari itu, budaya juga berarti "*a major site of ideological struggles; a terrain of 'incorporation' and 'resistence', one of the sites where hegemony is to be won or lost* (Storey, 1996). Kelompok kepentingan yang memenangi kontestasi kuasa akan memiliki hegemoni terhadap mayarakat tertentu, sedangkan kelompok lain yang tidak memenangi hegemoni dapat memilih untuk menggabungkan diri atau melakukan resistensi. Proses itulah yang disebut *Foucault* sebagai relasi kuasa. Namun, "relasi kekuasaan dalam hal ini tidak dilihat sebagai satu arah yang linear atau vertikal, sebagai entitas yang diperebutkan atau dipakai untuk menindas atau memberontak, melainkan sebagai suatu potensi yang bersirkulasi terus menerus tanpa henti, mendorong kreativitas dan produktivitas budaya" (Budianta, 2006). Hal ini karena budaya adalah semacam organisme yang akhirnya mampu mengenali dirinya, apakah dia sedang sakit atau sehat. Miles menyebutkan, "*culture, then, is a work of renewal in specific conditions. Those conditions are reproduced in cultural forms but may also be shown in new ways which eventually modify their reproduction*" (2007). Dari Miles ini kita dapat melihat bahwa budaya selalu memperbaharui dirinya sendiri. Budaya terus berubah dan dapat dilihat dari '*cultural forms*' nya, baik dalam produk maupun praktik. Pembaharuan itu terjadi karena kondisi spesifik tertentu sudah tidak sesuai atau sudah mengganggu sehingga kondisi tersebut direproduksi dalam bentuk atau praktik yang baru, yang sesuai dengan perjalanan budaya tersebut ke depan.

Korupsi sebagai Kondisi Spesifik

Harus diakui bahwa kondisi spesifik yang kita alami saat ini, salah satunya, adalah darurat korupsi. Tentu saja korupsi bukanlah sebuah ideologi tersendiri. Tidak ada orang yang

memiliki keyakinan untuk menjadi koruptor. Namum korupsi sudah menjadi **praktik** yang sudah demikian erat dengan cara kita mencari nafkah dan mengatasi masalah. Praktik ini akhirnya berkelindan dengan cara kita berpikir, tanpa kita sadari. Misalnya, ketika kita melanggar dan hendak ditilang polisi, kita berpikir bahwa (paling tidak dulu) membayar polisi di tempat adalah sesuatu yang wajar. Padahal, pada saat yang sama baik si polisi maupun yang ditilang sama-sama melakukan tindakan korup: satu pihak menerima uang yang sebenarnya hak negara, yang lain 'membayar' denda lebih sedikit dari yang seharusnya. Dengan demikian, kita mengembangkan 'ideologi' tahu-sama-tahu, tanpa menyadari efek dari cara berpikir demikian. Dengan praktik koruptif yang begitu masif dan dalam berbagai skala, skala kecil (di jalan) maupun besar (di pengadilan), kita sedang memiskinkan negara yang membutuhkan dana untuk memfasilitasi kehidupan kita. Kita ingin fasilitas jalan yang mulus, tetapi dana negara terbatas. Sudah dalam keadaan terbatas, dana pembuatan jalan masih disunat atau dikorupsi sana-sini, sehingga kualitas pembangunan jalan menjadi tidak baik. Karena kualitas yang tidak baik, jalan hanya mulus dalam hitungan bulan, bahkan minggu. Jalan yang rusak membutuhkan perbaikan, dan itu membutuhkan dana lagi. Dana perbaikan disunat lagi, sehingga perbaikan tidak maksimal dan jalan rusak lagi. Demikian seterusnya, dan ini menjadi lingkaran setan, padahal kita sendirilah setannya. Lebih celaka lagi, karena keterbatasan dana tersebut negara harus hutang ke luar negeri. Jika kita tidak hati-hati, kita akan menjadi negara yang gagal bayar seperti Yunani, yang kita tahu kegagalannya karena masyarakatnya ingin fasilitas dari negara, tetapi sebagian besar tidak bersedia membayar pajak sehingga negara harus terus berhutang. Padahal, kondisi kita saat ini menunjukkan bahwa kita juga malas membayar pajak, dan ini diperburuk lagi dengan pajak yang terbatas itu masih dikorupsi.

Korupsi, sebagai kondisi spesifik kita, untungnya mulai disadari sebagai penyakit bangsa. Di sini kita lihat bahwa "*way*

of life" kita, budaya kita, mampu mendeteksi penyakitnya sendiri. Seperti kata Miles, "*culture . . . is a work of renewal in specific conditions*" atau kerja bagi pembaharuan kondisi spesifik (dalam hal ini korupsi) di masyarakat kita. Proses 'pembersihan diri' itu pun terjadi. Sebagai entitas budaya kita sadar bahwa korupsi adalah penyakit yang menggerogoti kita seperti narkoba, jika kita tidak bertindak, kita akan mati perlahan tapi pasti. Tetapi tentu saja itu bukan suatu hal yang mudah. Tubuh budaya kita sudah terbiasa menikmati narkoba itu, terutama bagian-bagian tertentu. Sayangnya bagian-bagian yang memiliki hegemoni di budaya kita itulah yang paling banyak menikmati korupsi. Namun, "*hegemony is . . . a measure ofplay of forces rather than a permanent state of affairs*" (*Storey, 1996: 58*). Hegemoni itu dapat bergeser tergantung*force* atau kuasa yang mana yang memenangi hegemoni. Jika hegemoni kelompok yang korup dapat digeser, meskipun tentu saja pasti ada resistensi, maka usaha kita sebagai entitas budaya untuk mereproduksi diri dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Inilah tantangan pemerintah kita saat ini.

KPK dan Gerakan Menolak Korupsi sebagai Budaya Tandingan

Dibentuk di tahun 2003 berdasarkan UU No. 30 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (*KPK*) berjalan tidak tanpa masalah. Pembentukan komisi ini, secara positif dapat kita lihat sebagai kemampuan bangsa kita dalam mendeteksi masalahnya. Dapat dikatakan bahwa bangsa kita dapat mengenali praktik budaya destruktif dalam dirinya, dan untuk itu ada upaya berupa produk dan praktik untuk 'memperbaharui kondisi spesifik' seperti yang disebutkan oleh Miles. Produk tersebut adalah UU dan KPK itu sendiri, sedangkan praktiknya adalah kiprah KPK dalam menjalankan fungsinya agar praktik negatif yaitu korupsi dapat dikendalikan. Namun, seperti yang sudah dapat disaksikan bersama, KPK sebagai produk dan praktik budaya harus berhadapan dengan tuannya sendiri, karena ternyata KPK adalah pil pahit yang selalu ingin dimuntahkan. Dengan

demikian KPK adalah produk dan praktik budaya yang berhadapan dengan budaya lama yang dominan, budaya korupsi, yang memiliki hubungan cinta dan benci. KPK adalah bentuk resistensi terhadap budaya korupsi dan memiliki relasi kuasa yang unik dengan bagian-bagian tubuh bangsa ini. Misalnya, kita melihat bagaimana KPK berhadapan dengan DPR, lembaga yang melahirkannya. KPK mendeteksi bahwa DPR adalah lembaga yang menjadi situs korupsi, namun DPR memiliki pertahanannya sendiri untuk terhindar dari KPK. Dalam konteks ini, KPK sebagai produk budaya yang ingin mengubah praktik budaya korupsi memiliki perjalanan panjang dan berliku.

Jika KPK merupakan produk *top down*, gerakan PMK (Puisi Menolak Korupsi) adalah gerakan *bottom up*. PMK adalah contoh sebuah gerakan budaya dari masyarakat akar-rumput dengan produk dan praktiknya yang mencoba menjadi tandingan dari korupsi sebagai budaya dominan. Produknya jelas, kumpulan puisi, dan praktiknya adalah *roadshow* dari kota ke kota dengan harapan agar masyarakat menyadari akan penyakitnya. Tidak seperti KPK, PMK tidak memiliki kewenangan apapun, namun kemampuannya untuk konsisten menciptakan budaya tandingan perlu terus dipertahankan dan jika mungkin ditularkan kepada komunitas-komunitas lain. Para penyair berpotensi sebagai '*agen*' perubahan berhadapan dengan struktur yang masif yang sudah belepotan korupsi. Tentu saja PMK harus membentuk budaya antikorupsinya sendiri, dan itu dapat dilihat dari transparansi PMK melalui para aktivisnya dalam mengelola kegiatan dan 'saweran' dana. Jika terus konsisten PMK dapat menciptakan apa yang sebut Bourdieu sebagai *habitus*-nya sendiri. Jika *habitus* ini diaku oleh kalangan yang lebih luas atau oleh komunitas-komunitas sejenis yang baru, masyarakat yang nir-korupsi, paling tidak memiliki indeks antikorupsi yang baik, akan dapat terwujud.

KPK dan PMK diharapkan terus menghasilkan produk, praktik, dan kesadaran tandingan di masyarakat untuk paling

tidak dapat mengatakan tidak pada korupsi. Tentu saja "katakan tidak" tidak boleh berhenti sebagai produk pencitraan seperti iklan yang pernah kita saksikan di TV. Katakan tidak harus menjadi budaya tandingan, produk dan praktik yang betul-betul dihidupi sebagai budaya baru agar nantinya dapat merebut hegemoni nilai bahwa negeri ini senyatanya tidak lagi kecanduan narkoba bernama korupsi.

Referensi

Budianta, M. (2006). "Budaya, Sejarah, dan Pasar: New Historicism dalam Perkembangan Kritik Sastra". *Susastra 3: Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya.* Jakarta: Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Vol. 2, No. 3.

Miles, M. (2007) *Cities and Cultures.* London: routledge.

Storey, J. (1996) *An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture.* New York:Harvester Wheatsheaf.

Thwaites, T. et. al. (1994) *Tools for Cultural Studies: An Introduction.* Melbourne: MacMillan.

13

LAWAN KORUPTOR LEWAT PINTU UTAMA

Rusda Leikawa

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Banyak hasil bumi yang dapat digunakan untuk memajukan dan membuat Indonesia menjadi negara yang mandiri. Akan tetapi kendati bangsa Indonesia sangat kaya akan hasil bumi tersebut, namun sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan, masih banyak rakyat Indonesia yang putus sekolah, menjadi pengangguran, serta memiliki tempat tinggal yang tidak layak.Ini hal yang sangat menyedihkan.

Sebenarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan rakyat menjadi sengsara di tengah kekayaan alam Indonesia, salah satunya adalah sebagian orang-orang dipemerintahan mengelola negara dengan tidak jujur, dan sebagiannya lagi bekerja dengan jujur tetapi hanya duduk diam membiarkan praktik korupsi berjalan tanpa membuat sebuah gerakan penolakan. Ini adalah sebuah kesalahan besar yang sengaja dibiarkan terjadi dalam pengelolaan negara, dengan adanya korupsi yang semakin hari tumbuh subur di setiap bidang, wilayah/daerah bahkan berkembang biak dalam suatu keluarga.